

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Saya tertarik pada bahasan yang berjudul “Penolakan Pemerintah Papua New Guinea (PNG) Terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Operasi Pembebasan Sandera WNI Di Papua New Guinea Tahun 2015“ karena pada bulan September 2015 lalu telah tersiar berita penyanderaan 2 warga negara Indonesia (WNI) di Papua New Guinea (PNG) melalui media massa. Ketertarikan tersebut mulai meningkat karena adanya sikap penolakan dari pemerintah PNG kepada pemerintah Indonesia untuk memberi ijin TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melakukan operasi pembebasan sandera tersebut. Jika dilihat dari jangka waktu, kasus ini juga tergolong kasus yang merupakan bagian studi dari program studi Hubungan Internasional yang masih baru yaitu terjadi pada bulan September tahun 2015.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Papua New Guinea merupakan bagian territorial dari negara Australia yang merdeka pada tanggal 16 September 1975 beribu kota di Port Moresby. Negara ini memiliki asal-usul eksternal yaitu Melanesia yang memiliki populasi yang cukup dominan di Papua New Guinea. Perbatasan wilayah yang dimiliki oleh Papua New Guinea merupakan bagian dari kekuasaan Eropa di akhir abad ke-19.<sup>1</sup> Karena PNG merupakan negara persemakmuran dari Inggris maka Kepala Negaranya adalah Ratu Elizabeth II dan dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan PNG. Negara ini juga menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Secara geografis, di bagian barat PNG berbatasan langsung dengan daratan Indonesia bagian paling timur yaitu Desa Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura yang berbatasan langsung dengan Desa Wutun, Provinsi Sandaun, PNG.

Pada tanggal 9 September 2015 terjadi kasus penyanderaan dua WNI Papua Barat yaitu Badar dan Dirman yang bekerja sebagai pengolah kayu di Skofro, distrik Adi Timur, Kabupaten Keerom, Papua oleh beberapa sipil bersenjata dan di bawa ke wilayah PNG untuk disandera.

---

<sup>1</sup> Dinnen, S. (2001). *LAW AND ORDER IN A WEAK STATE (CRIME AND POLITICS IN PAPUA NEW GUINEA)*. Honolulu: University of HAWAII Press.

Pihak penyandera juga menginginkan barter tawanan dengan rekannya yang ditahan di Polsek Keerom.<sup>2</sup>

Penyanderaan tersebut melibatkan wilayah negara PNG yang membuat pemerintah Indonesia harus mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk dapat melakukan operasi pembebasan sandera.<sup>3</sup> Hal tersebut mendapat respon yang cukup tinggi dari pemerintah Indonesia termasuk pihak Kepolisian Republik Indonesia seperti yang dituturkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Badrodin Haiti: “Kalau mereka izinkan aparat keamanan Indonesia untuk melakukan tindakan, ya boleh. Sebab kita (RI) tidak punya kewenangan di sana. Jangan anggap itu (PNG) wilayah kita”<sup>4</sup>

Pada tanggal 16 September 2015 Pemerintah Indonesia menggelar rapat khusus di KEMENKO POLHUKAM, dan menyiapkan pasukan TNI untuk siaga di perbatasan wilayah RI dan PNG.<sup>5</sup> Seperti dipaparkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, personel TNI yang dikerahkan tidak bisa memasuki wilayah PNG. Mengingat, pemerintah

---

<sup>2</sup> Aziz, R. A. (2015, September 16). *infografis/3020492/misi-menyelamatkan-2-wni-dari-tangan-kelompok-bersenjata*. Diakses pada November 3, 2015, dari <http://news.detik.com>: <http://news.detik.com/infografis/3020492/misi-menyelamatkan-2-wni-dari-tangan-kelompok-bersenjata>

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Armenia, R. (2015, September 16). *Negosiasi Pembebasan WNI, Militer Siapkan Kekuatan Besar*. Diakses pada November 4, 2015, dari CNN Indonesia Web Site: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150916072757-20-79016/negosiasi-pembebasan-wni-militer-siapkan-kekuatan-besar/>

<sup>5</sup> Aziz, R. A. (2015, September 16). *infografis/3020492/misi-menyelamatkan-2-wni-dari-tangan-kelompok-bersenjata*. Diakses pada November 3, 2015, dari <http://news.detik.com>: <http://news.detik.com/infografis/3020492/misi-menyelamatkan-2-wni-dari-tangan-kelompok-bersenjata>

PNG memang melarang TNI bergerak masuk ke wilayahnya dan menyerahkan kasus penyanderaan ini kepada tentara mereka.<sup>6</sup>

PNG telah melakukan negosiasi dengan para penyandera untuk membebaskan WNI pada tanggal 17 September 2015 namun hal tersebut tidak terjadi. Maka Indonesia semakin mendesak PNG untuk mengizinkan TNI melakukan operasi pembebasan meskipun Indonesia telah menyerahkan kasus tersebut kepada PNG (PNGDF). Desakan dari pemerintah Indonesia tetap tidak mengubah PNG dalam menyelesaikan kasus tersebut. PNG tetap menolak TNI melakukan operasi pembebasan di wilayahnya. Berdasarkan informasi yang ada, dua WNI diurus oleh wanita yang merupakan bagian dari para penyandera.<sup>7</sup> Karena terdapat wanita ditempat penyanderaan PNG tetap melarang TNI melakukan operasi pembebasan, mengingat PNG ingin melindungi rakyatnya dan tidak ingin adanya korban jiwa sebagai dampak operasi pembebasan sandera. Indonesia sudah melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku penyanderaan tersebut, namun kasus tersebut melibatkan wilayah teritori negara tetangga yaitu PNG dimana Indonesia tidak dapat sewenang-wenang mengejar ataupun menangkap pelaku penyanderaan karena harus

---

<sup>6</sup> Ferri, O. (2015, September 17). *Papua Nugini Bebaskan 2 WNI Disandera OPM, TNI Jaga di Perbatasan*. Diakses pada November 6, 2015, dari Liputan6 News Web site: <http://news.liputan6.com/read/2319846/papua-nugini-bebaskan-2-wni-disandera-opm-tni-jaga-di-perbatasan>

<sup>7</sup> ABC News. (2015, September 18). *PNG Defence Force Rescues Indonesian Hostages*. Diakses pada Desember 2015, 2015, dari ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2015-09-18/png-defence-force-rescues-indonesian-hostages/6786154>

melewati batas negara. Indonesia terus mendesak pemerintah PNG untuk mendapatkan ijin melakukan operasi pembebasan sandera.

Sebelumnya pernah terjadi kejadian serupa, yaitu penyanderaan terhadap WNI pada tanggal 28 Maret 1981. Lima orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein, dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok Islam ekstremis 'Komando Jihad'. Mereka membajak pesawat DC-9 Garuda Indonesia dan memaksa untuk dapat lepas landas di bandara Woyla Thailand. Kelompok penyandera tersebut memiliki beberapa tuntutan terhadap pemerintah Indonesia yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia kemudian melakukan negosiasi terhadap pemerintah Thailand untuk dapat melakukan operasi pembebasan terhadap WNI yang disandera. Hal tersebut disetujui oleh pemerintah Thailand dan operasi militer pembebasan tersebut berhasil dilakukan oleh TNI dan dibantu oleh angkatan senjata Thailand.<sup>8</sup>

Ada yang berbeda pada kasus penyanderaan WNI pada kali ini di PNG tahun 2015. Ketika pemerintah Indonesia mencoba untuk bernegosiasi dengan pemerintah PNG untuk dapat melakukan operasi pembebasan sandera seperti yang telah sebelumnya dapat dilakukan oleh TNI di Thailand. Namun kini TNI tidak dapat melakukan operasi pembebasan sandera yaitu karena adanya penolakan dari pemerintah PNG

---

<sup>8</sup> Setiawan, R. (2015, September 19). *Memetik Hikmah dari Kasus Penyanderaan*. Diakses pada November 9, 2015, dari Suara News Web site: <http://www.suara.com/news/2015/09/19/065623/memetik-hikmah-dari-kasus-penyanderaan>

untuk memberi ijin kepada TNI untuk melakukan operasi pembebasan dua WNI yang sedang di sandera di wilayah PNG. Meskipun kekuatan dari TNI sudah bersiaga dan siap jika sewaktu-waktu Angkatan Bersenjata PNG (PNGDF-Papua New Guinea Defence Force) tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat dan tepat. Namun hal tersebut ditolak oleh Pemerintah PNG karena pemerintah PNG meminta Indonesia untuk menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas pemerintah setempat dalam melakukan operasi pembebasan karena ini berhubungan dengan adat setempat.<sup>9</sup> Sebagai wujud saling menghargai otoritas masing-masing negara Indonesia dan PNG telah sepakat untuk maka Indonesia menyerahkan kasus tersebut untuk diselesaikan oleh pihak PNG. Hal ini memperlihatkan adanya kepentingan dari pemerintah PNG terhadap operasi pembebasan WNI yang disandera oleh sipil bersenjata yang sebelumnya disangka sebagai bagian dari anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka). Lenis Kagoya tidak membenarkan keterangan yang menyebutkan pembebasan 2 sandera, dilakukan melalui operasi militer yang dilakukan tentara PNG. Dia juga membantah kalau penyandera merupakan bagian dari jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berada di perbatasan.<sup>10</sup> Selain itu pemerintah PNG tidak memberikan ekstradisi pelaku penyanderaan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup> BBC NEWS. (2015, September 15). *RI upayakan pembebasan dua WNI yang disandera di PNG*. Diakses pada November 4, 2015, dari BBC Web site: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150914\\_indonesia\\_sandera\\_papua](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150914_indonesia_sandera_papua)

<sup>10</sup> VIVA NEWS INDONESIA. (2015, September 19). *WNI disandera di PNG TNI kalau brak-bruk 5 menit selesai*. Diakses pada November 17, 2015, dari Viva News Indonesia: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/674355-wni-disandera-di-png--tni--kalau-brak-bruk-5-menit-selesai>

Karena alasan penolakan tersebut tidak dijelaskan dengan pasti oleh pemerintah PNG dengan alasan masih dalam kasus penyelidikan selanjutnya.

Adanya pemberitaan media di PNG yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia diduga melakukan manupulasi penyanderaan tertentu membuat PNG makin kuat menolak permintaan Indonesia untuk menerjunkan TNI melakukan operasi penyanderaan. Dengan adanya isu-isu bahwa OPM merupakan pelaku penyanderaan. Ini semua adalah politik kepentingan dimana hanya masing-masing negara saja yang mengerti secara nyata. Namun pembuatan kebijakan tersebut dapat di analisa berdasar perilaku negara yang diamati.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu: “Mengapa pemerintah Papua New Guinea (PNG) menolak adanya keterlibatan (TNI –Tentara Nasional Indonesia) dalam melakukan operasi pembebasan sandera WNI di wilayah Papua New Guinea tahun 2015?”

### **D. KERANGKA TEORITIK**

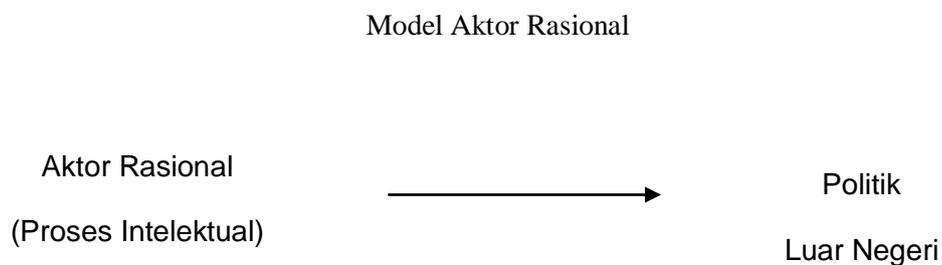
Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Pada uraian mengapa pemerintah PNG tidak memberikan ijin kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan operasi pembebasan WNI yang disandera di

wilayah PNG, titik berat penulis pada tingkat politik luar negeri PNG terhadap Indonesia dalam mempertimbangkan proses operasi penyelamatan sandera WNI di PNG. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis menggunakan teori pembuatan keputusan politik luar negeri dari Graham T. Allison.

Ada 3 jenis model pengambilan keputusan menurut Graham T. Allison, dalam bukunya “*Essence of Decisions : Explaining the Cuban Missile Crisis*” yaitu:

1. *Rational Actor Model*-Model Aktor Rasional (Model I)
2. *Organizational Process Model*-Model Proses Organisasi (Model II)
3. *Governmental (Bureaucratic) Politics Model*-Model Politik Pemerintahan (Birokrasi) (Model III) <sup>11</sup>

Untuk menganalisa kasus yang terjadi yaitu larangan pemerintah PNG terhadap TNI dalam melakukan operasi pembebasan sandera di wilayah PNG tahun 2015 penulis menggunakan **Model I Rasional Aktor** .



---

<sup>11</sup> Allison, G. T. (1971). *Essence of Decisions : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Hal 15

Mohtar Mas'oe'd dalam bukunya, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi" halaman 234:

".....politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu."<sup>12</sup>

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep dasar dari aktor rasional berdasar buku "*Essence of Decisions: Explaining the Cuban Missile Crisis*", yaitu:

1. *Goal and objectives* (tujuan dan sasaran)

---

<sup>12</sup> Mas'oe'd, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Tujuan dan sasaran ini berfungsi sebagai keperluan atau preferensi, dimana mewakili nilai atau kegunaan dari pilihan alternatif untuk menentukan konsekuensi yang akan dihadapi. Tujuan dan sasaran dari pemerintah PNG adalah melindungi otoritas dan menjaga utuh kedaulatan pemerintah terhadap rakyat, wilayah dan budaya setempat. Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar untuk menentukan pilihan alternative dan konsekuensinya yang akan dihadapi jika mengizinkan atau menolak TNI memasuki wilayah PNG untuk melakukan operasi pembebasan WNI.

2. *Alternatives* (pilihan alternatif)

Agen rasional harus menentukan pilihan yang telah ada sebelum dia terlibat pada situasi yang akan dihadapi. Dalam teori pembuatan keputusan pilihan-pilihan alternatif ini direpresentasikan sebagai pohon keputusan. Pilihan alternatif ini dijalankan sebagai tindakan yang mungkin termasuk lebih dari perbuatan yang sederhana, tapi spesifikasinya harus cukup berharga untuk dibedakan dengan pilihan alternative lainnya. Maka sebelum pemerintah PNG membuat keputusan untuk menolak TNI melakukan operasi pembebasan, sebelumnya harus menentukan alternative yang tepat. Yaitu menolak atau mengizinkan TNI untuk melakukan operasi pembebasan.

3. *Consequence* (konsekuensi)

Untuk setiap pilihan alternatif akan mengandung konsekuensi atau hasil dari pilihan yang pasti terjadi jika pilihan alternatif tersebut telah dipilih. Setelah pilihan tersebut sudah tersedia, yaitu menolak atau mengizinkan TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan, kemudian pemerintah memperkirakan konsekuensinya jika pemerintah menolak atau mengizinkan TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan.

Jika pemerintah menolak TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan, maka konsekuensinya adalah pemerintah harus mengerahkan kekuatan nasionalnya untuk melakukan operasi pembebasan, namun adapula keuntungannya yaitu dapat menjaga otoritas dan kedaulatan negaranya sesuai dengan tujuan dan sasaran dari negaranya. Tetapi jika pemerintah mengizinkan TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan, konsekuensinya yaitu akan terciptanya ketegangan situasi akibat masuknya TNI masuk di wilayah PNG karena TNI merupakan militer dari warga asing bagi penduduk PNG dan belum tentu paham mengenai kultur dan adat di PNG yang cukup beragam.

#### 4. *Choice* (pilihan)

Pilihan rasional mengandung penyederhanaan dari pemilihan alternatif dimana konsekuensi tertinggi telah dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Maka dengan melihat konsekuensi dari tiap alternatif, pemerintah PNG akan memilih untuk menolak memberi ijin kepada TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan. Karena telah terlihat resiko yang cukup tinggi jika memberikan ijin kepada TNI untuk masuk dan melakukan operasi pembebasan.

Selain empat konsep dasar dari aktor rasional, terdapat juga tiga elemen pendukung dimana pilihan tersebut dapat dikatakan rasional, yaitu :

1. Pertimbangan intelektual

Ketika pemerintah PNG memutuskan untuk menolak masuknya TNI maka sebelum keputusan tersebut dibuat ada proses pertimbangan dari konsekuensi. Yaitu melalui pertimbangan yang bernalar dan terkoordinasi didasarkan pada aspek untung-rugi dengan mengedepankan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu negara.

Berikut merupakan skema tabel untung-rugi untuk dapat menyederhanakan alternatif-alternatif yang ada:

Tabel 1.1. Tabel Untung-Rugi<sup>13</sup>

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Opsi A	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
Opsi B	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

(Tabel diatas dapat digunakan juga untuk mempermudah aktor rasional dalam menentukan resiko dari setiap pilihan yang akan dipilih oleh aktor rasional)

Untuk melindungi kepentingan nasional pemerintah PNG mempertimbangkan bahwa kejadian penyanderaan terjadi di dalam hutan wilayah PNG, maka lokasi penyanderaan bisa sewaktu-waktu akan berpindah. Sedangkan TNI belum paham medan di wilayah tersebut dan dikhawatirkan akan mengganggu kedaulatan negara, menimbulkan situasi tegang terhadap penduduk sekitar dan juga tidak mengetahui karakteristik budaya penduduk PNG. Selain itu jika pemerintah PNG berhasil melakukan operasi pembebasan maka akan terbentuk citra positif dari pemerintah PNG melalui PNGDF di Indonesia dan masyarakat internasional. Dimana pencitraan ini akan terus mengikuti kiprah PNGDF di mata internasional

---

<sup>13</sup> Graham T. Alison, "The Essence Of Decision", dikutip dari diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2013

termasuk Indonesia karena telah berjasa menyelamatkan dua sandera WNI.

## 2. Tujuan kepentingan jangka panjang

Tujuan dalam kepentingan jangka panjang ini menurut pemerintah PNG akan efektif dan aman bagi penduduk PNG jika TNI tidak masuk dan melakukan operasi pembebasan sandera di wilayah PNG. Karena menghindari adanya kontak senjata di wilayahnya. Selain itu Lenis Kagoya membantah bahwa pelaku penyanderaan merupakan anggota OPM<sup>14</sup>, maka diduga pelaku penyanderaan merupakan sipil bersenjata berkewarganegaraan PNG. Karena pemerintah PNG ingin menjaga kedaulatan negaranya maka ekstradisi sandera pun tidak ditindaklanjuti.

## 3. Kondisi pemerintah yang monolitik

Pemerintah PNG cukup monolit (solid) dalam menanggapi kasus penyanderaan WNI di PNG hal ini dibuktikan ketika keikutsertaan komandan militer angkatan darat PNGDF, Gilbert Toropo dalam operasi pembebasan WNI oleh PNGDF serta bantuan dari pemangku adat setempat yang turut serta dalam operasi pembebasan.<sup>15</sup> Dari keikutsertaan Staff Khusus

---

<sup>14</sup> SINDO NEWS. (2015, September 18). *Istana Ungkap Penyandera 2 WNI di Papua Nugini*. Diakses pada Februari 12, 2016, dari SINDO NEWS: <http://nasional.sindonews.com/read/1046145/14/istana-ungkap-penyandera-2-wni-di-papua-nugini-1442557687>

<sup>15</sup> Pratomo, Y. (2015, September 19). *Hebatnya Tentara Papua Nugini Hentikan Drama Penyanderaan WNI*. Diakses pada November 10, 2015, dari Merdeka News:

Presiden dan pemangku adat untuk membantu militer (PNGDF) menunjukkan bahwa PNG mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik.

Alternatif keputusan yang dibuat berdasarkan kondisi yang harus dipertimbangkan yaitu bagaimana suatu negara dapat menjaga otoritas kedaulatannya yang meliputi dari wilayah geografis, warga negara dan juga adat setempat yang belum tentu warga negara asing mengetahui dan memahaminya. Selain itu PNGDF akan mendapat sorotan dari Indonesia dan masyarakat internasional karena telah membebaskan sandera dengan cara *minimal force* (yaitu pembebasan tanpa ada baku tembak) dan tanpa ada barter tawanan seperti yang diinginkan pemerintah Indonesia karena dibantu oleh pemangku adat setempat.<sup>16</sup> Maka hal tersebut diperhitungkan oleh pemerintah PNG dalam membuat keputusan untuk mengizinkan atau menolak TNI melakukan operasi penyelamatan.

## **E. HIPOTESIS**

Dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, dalam penelitian tentang alasan pemerintah PNG menolak adanya keterlibatan TNI dalam melakukan operasi pembebasan sandera WNI di PNG oleh sekelompok sipil bersenjata karena:

---

<http://www.merdeka.com/peristiwa/hebatnya-tentara-papua-nugini-hentikan-drama-penyanderaan-wni.html>

<sup>16</sup> Ibid.

1. Oleh pihak PNG hal tersebut dipandang lebih menguntungkan dimana pemerintah PNG dapat melindungi kerahasiaan wilayah teritorinya dan juga membentuk citra positif terhadap PNGDF atas keberhasilan operasi penyelamatan sandera WNI.
2. Untuk jangka panjang, keamanan terhadap kedaulatan pemerintah PNG terjamin dimana tidak ada korban jiwa sebagai dampak dari operasi penyelamatan. Mengingat lokasi penyanderaan berada di hutan dan juga terdapat sejumlah wanita yang merawat korban sandera sehingga tidak tercipta ketegangan drama operasi pembebasan sandera.
3. Kesolidan pemerintah PNG cukup baik dipandang mampu untuk mengatasi kasus tersebut dengan adanya kerjasama yang baik antara PNGDF bersama pemangku adat setempat.

## **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas maka penelitian ini dibatasi pada keputusan PM Peter O'neil terhadap pemerintah Indonesia yang melarang TNI untuk memasuki wilayah PNG pada situasi upaya pembebasan WNI di PNG pada bulan September tahun 2015.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder, dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan pengumpulan

data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi: literatur yang relevan, surat kabar, internet dan lain-lain.

## **H. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa pemerintah PNG tidak mengizinkan pemerintah Indonesia menerjunkan TNI dalam menyelesaikan kasus penyanderaan WNI oleh sekelompok sipil bersenjata tahun 2015 di wilayah PNG.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I** : Pada BAB I ini akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian yang berisikan mengenai Judul, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Tujuan Penelitian.

**BAB II** : Pada BAB II ini akan memaparkan mengenai dinamika hubungan politik antara Indonesia dengan PNG secara umum.

**BAB III** : Pada BAB III ini akan mendeskripsikan latar belakang politik terjadinya penyanderaan di PNG.

**BAB IV** : Pada BAB IV ini akan menjelaskan mengenai ketidaksediaan pemerintah PNG terhadap keikutsertaan

TNI dalam melakukan operasi pembebasan dua WNI yang disandera.

**BAB V** : Pada BAB V ini akan menjelaskan mengenai penutup dan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.